



Peran Asean Dalam Konflik Bersenjata Kamboja- Thailand (Studi Kasus Kuil Preah Vihear)

Kuswanto^{1*}

*Email: kuswantomayada@gmail.com¹

*Corresponding Author

Abstrak:

Dalam konteks hubungan antarnegara cenderung menggambarkan intensitas hubungan yang dinamis. Dinamika tersebut bisa tergambar dalam hubungan bilateral Kamboja-Thailand. Keduanya memiliki historis konflik bersenjata yang panjang akibat masalah perbatasan, terutama kasus perebutan Kuil Preah Vihear yang diklaim berada di batas kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk mencari penyebab konflik bersenjata Kuil Preah Vihear dan peran ASEAN dalam mengatasi konflik bersenjata tersebut. Tulisan ini termasuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan *library research* untuk mencari data yang valid dan komprehensif. Untuk mempermudah analisis, penulis menggunakan teori Keamanan Nasional, Kepentingan Nasional dan resolusi konflik. Adapun kesimpulan dari penulisan ini: *pertama*, setiap negara memperjuangkan keamanan dan kepentingan nasional masing-masing. Jadi, kalau ada negara lain yang mengusik wilayahnya, maka negara tersebut berhak untuk membela sekaligus melindungi wilayah kedaulatannya; *kedua*, faktor penyebab konflik Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand Adalah sengketa perbatasan, dan kelak dikemudian hari semakin meluas dengan melibatkan operasional militer kedua negara di periode 2003, 2008 dan yang terakhir pada Desember 2025; *ketiga*, ASEAN berperan sebagai *peacemaker* untuk menyelesaikan konflik Preah Vihear yaitu dengan memfasilitasi pertemuan trilateral antara pemimpin ASEAN, Thailand dan Kamboja dan memediasi kasus ini dengan memasukkan kasus Preah Vihear ke dalam agenda pertemuan ASEAN. Di sisi lain, penulis Perlunya ASEAN menerapkan kembali ASEAN Way, mengadakan *Joint Border Committe (JBC)*, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan juga ASEAN Defence Minister Meeting serta bisa menerapkan Kembali strategi *Shuttle Diplomacy* ASEAN.

Kata Kunci: ASEAN, Konflik, Kamboja-Thailand

Abstract:

In the context of interstate relations, interactions tend to reflect a dynamic intensity. This dynamic can be observed in the bilateral relationship between Cambodia and Thailand, which has a long history of armed conflict due to border disputes, particularly the contestation over the Preah Vihear Temple, which is claimed to lie along the boundary of both countries. This study aims to identify the causes of the armed conflict over the Preah Vihear Temple and to examine the role of ASEAN in addressing the conflict. This research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing library research to obtain valid and comprehensive data. To facilitate the analysis, the study employs the theories of national security, national interest, and conflict resolution. The findings of this study indicate that, first, each state strives to safeguard its own security and national interests. Therefore, when another state threatens its territorial integrity, it has the right to defend and protect its sovereignty. Second, the primary cause of the Preah Vihear conflict between Cambodia and Thailand is a border dispute, which has escalated over time, involving military operations by both countries in 2003, 2008, and most recently in December 2025. Third, ASEAN has played a role as a peacemaker in resolving the conflict by facilitating trilateral meetings between ASEAN, Thailand, and Cambodia, as well as mediating the issue by placing the Preah Vihear case on the ASEAN agenda. Furthermore, this study suggests that ASEAN should reinforce the ASEAN Way, conduct Joint Border Committee (JBC) meetings, convene ASEAN Summits and ASEAN Defence Ministers' Meetings, and reimplement the strategy of ASEAN shuttle diplomacy to effectively manage and resolve the conflict.

Keywords: ASEAN, Conflict, Cambodia-Thailand

1. Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara merupakan suatu wilayah yang dinamis namun terkadang menimbulkan instabilitas akibat konflik atau perselisihan internal antar anggota ASEAN maupun yang melibatkan negara lain di kawasan tersebut. Adapun jenis konflik di ASEAN meliputi sengketa wilayah dan perbatasan seperti Sabah, konflik di Laut Cina Selatan, Candi Preah Vihear), konflik internal negara anggota seperti kudeta militer Myanmar), persaingan geopolitik regional seperti Laut Cina Selatan), dan masalah sosial lintas batas seperti kemiskinan, kejahatan, dan lingkungan. Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi ASEAN, konflik bersenjata Thailand dan Kamboja yang belum bisa diselesaikan dari sisi pendekatan diplomatik maupun militer.

Thailand dan Kamboja awalnya memiliki hubungan yang baik dan jarang terlibat pertikaian satu sama lain namun hubungan itu mulai renggang pasca terjadinya Perang Indochina pada tahun 1975. Secara khusus, hubungan tersebut kian memburuk dikarenakan sengketa perbatasan terkait Kuil Preah

Vihear pada tahun 2003. Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama puluhan tahun. Awalnya, konflik ini berakar dari ketidakjelasan batas wilayah peninggalan kolonialisme Prancis dan kerajaan Siam. Putusan International Court of Justice (ICJ) pada tahun 1962 menetapkan bahwa Kuil Preah Vihear merupakan bagian dari wilayah Kamboja. Namun Keputusan ini ditentang Thailand.

2. Tinjauan Pustaka

Situasi memanas kembali pada awal 2025 ketika Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau darat di wilayah perbatasan. Ketegangan berubah menjadi konflik terbuka dengan keterlibatan militer dan penggunaan artileri berat serta serangan udara. Pada Juli 2025 konflik bersenjata meletus di sekitar kawasan kuil Preah Vihear dan Segitiga Zamrud. Ketegangan ini menimbulkan korban jiwa dan memaksa ratusan ribu warga dari kedua negara mengungsi.

Pada mulainya, konflik tersebut bersifat historis dimana sengketa perbatasan telah berlangsung lama, dan muncul saat Kamboja mendaftarkan situs warisan dunia (seperti Kuil Preah Vihear) ke UNESCO, yang ditentang Thailand. Hubungan antara kedua negara tetap rumit. Penetapan batas wilayah yang tidak lengkap telah menyebabkan konflik perbatasan yang berkepanjangan, terutama terkait kuil Preah Vihear, yang dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 1962. Dari sini turut memicu konflik militer sporadis (terutama 2003, 2008, 2011, dan eskalasi besar pada 2025).

Pada periode tahun 2025, ada sejumlah pertempuran yang terjadi. Pada Juli 2025, bentrokan kekerasan terjadi antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan yang disengketakan, mengakibatkan lebih dari 30 orang tewas dan pengungsian lebih dari 270.000 orang (AP News. 27 Juli 2025). Pada 27 Desember 2025, kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata setelah perselisihan perbatasan yang panjang. Konflik ini merupakan kelanjutan dari ketegangan jangka panjang di sepanjang 800 km garis perbatasan Thailand-Kamboja, yang telah menjadi sumber sengketa sejak akhir abad ke-20. Eskalasi konflik bersenjata ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Selain mengancam keamanan masyarakat sipil, konflik berisiko memicu peningkatan arus pengungsi, peredaran senjata lintas batas, serta ketegangan politik yang lebih luas. Tentunya bahwa setiap kawasan memiliki organisasi yang menaunginya, di Asia Tenggara, organisasi yang dimaksud adalah ASEAN.

Menarik untuk dicermati peran dan upaya ASEAN yang sebagai organisasi yang menaungi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Kasus ini memunculkan tantangan dan keterbatasan bagi ASEAN dimana di satu sisi menampakkan Prinsip Non-Intervensi dimana prinsip ini menghormati kedaulatan negara lain dengan tidak melakukan intervensi ke dalamnya. Namun di sisi lain, justru hal ini memposisikan ASEAN tidak memiliki *power bargaining* kuat untuk menyelesaikannya, sehingga memantik keterlibatan ICJ, PBB maupun negara luar untuk terlibat di dalamnya.

Dari sini jelas bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada kemauan politik (politiwal will) pihak-pihak yang terlibat. Tentunya politiwal will tergantung pada persepsi kedua

negara dalam memperjuangkan konsep keamanan dan kepentingannya masing-masing. Sedangkan ASEAN hanya menyediakan mekanisme mediasi regional yang sekedar menerapkan Prinsip Non-Intervensi tanpa disertai kekuatan untuk memaksa.

Jika konflik bersenjata yang melibatkan kedua belah pihak dibiarkan berlarut-larut maka terdapat dampak regional seperti: pengungsian warga sipil di daerah perbatasan, mengganggu hubungan bilateral serta dinamika kerjasama antar anggota ASEAN, sekaligus menjadi ujian bagi netralitas dan ketegasan ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Maka dari itu, pada penelitian ini dapat di tarik permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa penyebab konflik bersenjata Kul Preah Vihear yang melibatkan Kamboja dan Thailand?
- b. Bagaimana peran ASEAN dalam mengatasi konflik bersenjata tersebut?

Teori Resolusi Konflik

Menurut Liliweri, teori resolusi konflik berfokus pada penyelesaian akar penyebab perbedaan antarpihak melalui negosiasi, kompromi, dan perubahan struktur sosial. Pendekatan ini bertujuan menciptakan perdamaian, keadilan, dan hubungan baru yang berkelanjutan (Liliweri, 2017))

Dalam resolusi konflik, Johan Galtung mendeskripsikan tiga pendekatan untuk mencapai perdamaian, yakni:

a. Peacemaking

Yakni proses yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan memakai jalan-jalan yang persuasif, seperti negosiasi, perundingan, musyawarah dengan para pimpinan yang memiliki wewenang. Bila dikaitkan dengan kasus Preah Vihear, para pemimpin dari pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan dengan pihak ketiga yang bersifat netral.

Adapun bentuk-bentuk *peacemaking* dapat berupa:

1) Fasilitasi

Dalam hal ini , fasilitator bertindak sebagai pihak yang menyediakan fasilitas atau sarana agar proses pembuatan rencana dengan sekelompok orang tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan proses rencana fasilitator hanya bertindak sebagai pihak ketiga dan tidak memihak kubu manapun karena tugas utamanya hanyalah membantu agar rencana bisa dijalankan dengan baik.

2) Mediasi

Proses penyelesaian suatu masalah antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan kehadiran pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam hal ini, netral adalah seseorang yang tidak memihak kubu manapun yang tengah bersengketa.

3) Arbitrasi

Pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian abritrase yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan dalam

perjanjian arbitrase berisi pokok permasalahan, jumlah yang harus dibayar dan pelaksanaan isi perjanjian. Setelah itu, para pihak masih harus membuat sebuah perjanjian tertulis lain, yaitu perjanjian penunjukan arbiter.

b. *Peacekeeping*

Bertujuan untuk menghentikan ataupun mengurangi segala bentuk intervensi dari pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga tidak perlu ada lagi segala bentuk kekerasan militer yang terjadi antara kedua pihak. Dengan kata lain, cara ini dilaksanakan dengan mediasi serta negosiasi antara kedua belah pihak.

c. *Peacebuilding*

Usaha melakukan pengurangan akar permusuhan diantara kedua belah pihak dimana dengan melakukan perubahan rekonstruksi social, ekonomi dan politik akibat adanya sengketa ini. Sehingga permusuhan yang dulunya selalu melibatkan kekerasan dapat diubah dan masyarakat bisa merasakan perdamaian di daerah objek sengketa.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengambil metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diamati selama penelitian berlangsung. Kemudian peneliti memilih data yang dibutuhkan dan mana tidak (Moleong, 2019). Peneliti mendapatkan data dengan cara mengambil dari data sekunder yang merupakan data yang secara tidak langsung untuk dikirimkan kepada pengumpul data, dalam arti melalui media sebagai perantara. Sumber data yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, publikasi dan sumber lain yang mendukung (Sugiyono, 2020).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Studi Pustaka (Library Research). Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Peneliti mengambil studi pustaka yang berasal dari literatur, catatan, buku serta tulisan lain untuk mendukung kelengkapan data.

4. Hasil

Thailand dan Kamboja adalah dua negara yang terletak di kawasan Indochina yang awalnya memiliki hubungan yang baik, namun hubungan itu mulai renggang pasca terjadinya perang Indochina pada tahun 1975 dan semakin memburuk dikarenakan perebutan kepemilikan Kuil Preah Vihear hingga tahun 2025. Kuil Preah Vihear merupakan kuil Hindu kuno yang dibangun abad ke-9 hingga ke-12 oleh Raja Suryavarman I dan II yang berlokasi di Pey Tadi yang memisahkan Kamboja dan wilayah Sisaket, Thailand. Mengingat pentingnya lokasi kuil tersebut bagi perbatasan kedua negara, sehingga turut memicu konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang terjadi selama beberapa periode.

Untuk mempermudah memetakan periode konflik, penulis membedakan menjadi beberapa periode, yakni:

a. Periode tahun 2003

Ketegangan hubungan diplomatik kedua negara dipicu oleh pernyataan kontroversial aktris Thailand, Suvanant Kongying yang menyatakan bahwa Angkor Wat sebenarnya milik Thailand. Akibatnya, pada Januari 2003, terjadi kerusuhan di Phnom Penh dimana terjadi demo massa yang bergerak dengan membakar kedutaan Thailand. Tidak berhenti sampai di sini, Warga Kamboja di Phnom Penh membakar foto Raja Bhumibol Adulyadej . Demo yang sama juga terjadi di Bangkok, dimana warga Thailand di Bangkok memprotes dengan membakar bendera Kamboja di depan kedutaan Kamboja. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Thailand memutuskan hubungan diplomatik dengan Kamboja.

b. Periode tahun 2008 dan 2010

Periode ini ditandai dengan bentrokan militer yang terjadi pada Oktober 2008 dan berlanjut pada April 2009, dimana tentara Thailand merusak bagian kuil tersebut saat melintasi perbatasan. Merespon keadaan ini, pada Februari 2010, pemerintah Kamboja mengajukan surat pengaduan resmi kepada *Google Maps* karena menggambarkan daerah aliran sungai alami sebagai perbatasan internasional. Pada akhirnya, pengajuan pemerintah Kamboja tersebut mendorong perundingan kedua negara pada Februari 2011. Ironisnya, masa perundingan tersebut diwarnai dengan bentrok bersenjata yang mengakibatkan luka-luka dan kematian di kedua belah pihak.

Untuk menengahi masalah ini, ASEAN menawarkan diri sebagai mediator, namun Thailand justru bersikeras menyelesaikan secara bilateral. Untuk mengatasi deadlock, Kamboja mengirim proposal pengelolaan kuil ke Konvensi UNESCO yang diadakan di Paris pada Juni 2011, dan proposal tersebut diterima. Akibatnya, Thailand menarik diri dari acara tersebut," (Sin Chew Daily . AFP . 26 Juni 2011). Tidak itu saja, untuk meredam eskalasi kekerasan bersenjata, ICJ memutuskan pada November 2013 bahwa daerah di sekitar dan di bawah kuil tersebut adalah milik Kamboja dan meminta pasukan keamanan Thailand yang berada di daerah tersebut harus pergi. Periode ini menggambarkan kemenangan diplomasi Kamboja.

Kamboja yang merasa teritorialnya terancam mulai melakukan hal yang sama. Kamboja mengirim tentaranya di wilayah kuil guna menghalangi tentara Thailand. Jumlah tentara Thailand dan Kamboja yang berjaga di sekitar kuil sekitar 4000 orang. Melihat tidak kunjung selesainya sengketa ini, PBB menunjuk ASEAN sebagai pihak ketiga yang menjadi penengah dalam upaya penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, ASEAN serta PBB mencoba menciptakan satu kondisi yang kondusif untuk dialog bilateral antar kedua Negara. ASEAN merasa ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang terjadi diantara kedua Negara karena kedua Negara ini sama-sama merupakan bagian dari anggota ASEAN. Selain karena ikut bertanggung jawab, ASEAN juga bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Thailand dan Kamboja dalam ASEAN Charter. Maka dari itu, ASEAN pun mengupayakan jalan diplomasi, diskusi dan lain-lain yang sifatnya non military untuk

menuntaskan sengketa ini. Agar kedepannya hubungan kedua Negara ini bisa membaik dan tidak mengganggu kinerja mereka didalam agenda ASEAN.

c. Periode tahun 2025

Sepanjang tahun 2011 hingga 2025, hubungan bilateral kedua negara relative stabil, namun Kembali memanas sejak Mei 2025. Konflik bersenjata kembali meletus yang melibatkan tentara Kamboja dan Thailand di dekat Segitiga Zamrud (The Asia Live . 2 Juni 2025). Pada Juni 2025, ada 101 orang sipil dan tentara tewas. Sebanyak 400.000 warga sipil dari kedua negara terpaksa mengungsi. Pada Juni 2025, Kementerian Luar Negeri Thailand menyampaikan protes resmi dan menyebut tindakan Kamboja sebagai "pelanggaran etika diplomatik, pelanggaran kepercayaan yang serius, dan merusak hubungan antara dua negara tetangga." (Al Jazeera . 19 Juni 2025).

Pada akhir Juli 2025, terjadi bentrokan antara Thailand dan Kamboja, yang telah menewaskan sedikitnya 16 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi di kedua negara, dapat "berkembang menjadi perang." Lebih dari 130.000 warga sipil di Thailand dan sekitar 38.000 di Kamboja dilaporkan mengungsi (Al Jazeera . Diakses 27 Juli 2025).

Pada Desember 2025, konflik kembali pecah hebat, dengan Thailand melancarkan serangan udara dan Kamboja membalas dengan artileri, menyebabkan korban jiwa dan memaksa ribuan orang mengungsi. Thailand menuduh Kamboja melanggar gencatan senjata tengah malam yang baru disepakati dengan melancarkan serangan bersenjata di beberapa lokasi di sepanjang perbatasan. Pada tanggal 29 Desember 2025, Kamboja diduga menerbangkan lebih dari 250 drone ke wilayah Thailand. Thailand mengatakan bahwa pelanggaran tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata (FP News Desk, 29 Desember 2025).

Diperkirakan bahwa eskalasi konflik ini kian memburuk dibanding periode sebelumnya akibat keterlibatan penggunaan persenjataan berat yang digunakan, jumlah korban yang tewas dan mengungsi. Akibatnya, terputusnya hubungan diplomatik bilateral kedua negara. Kondisi ini tentunya mempengaruhi hubungan antaranggota ASEAN.

Penyebab konflik bersenjata

Latar belakang konflik adalah perebutan wilayah garis perbatasan. Sengketa antara Thailand dan Kamboja terutama dipicu oleh klaim atas wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear. Sengketa Peta dan Batas Wilayah dikarenakan Kamboja menggunakan peta Prancis-Siam tahun 1907/1908 yang menunjukkan kuil berada di wilayah Kamboja, sementara Thailand memiliki peta berbeda dan merasa peta tersebut tidak adil. Untuk menengahi masalah tersebut, Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962 memutuskan kuil Preah Vihear berada di kedaulatan Kamboja, tetapi Thailand tetap menentang interpretasi batas di area sekitar kuil. Dan ketegangan terjadi lagi tahun 2008 saat Kamboja mengajukan status warisan dunia ke UNESCO pada tahun 2008.

Meskipun Mahkamah Internasional pada tahun 1962 menyatakan kuil berada di wilayah Kamboja, sengketa terhadap wilayah sekitarnya masih berlanjut. Perbedaan persepsi dan kepentingan inilah yang

mengakibatkan konflik berlanjut hingga akhir tahun 2025. Inilah yang menyebabkan Kuil Preah Vihear menjadi penting karena Kuil Preah Vihear menjadi simbol identitas nasional yang kuat bagi kedua negara, memicu sentimen nasionalis yang tinggi. Apalagi kuil tersebut sudah menjadi Warisan Dunia UNESCO. Konflik ini merupakan produk menunjukkan betapa Thailand dan Kamboja sangat memperhitungkan faktor identitas budaya dalam menjalankan arah hubungan luar negerinya. Persepsi strategis Thailand dan Kamboja terhadap aspek budaya itu ternyata turut menentukan cara mereka bertindak dalam penyelesaian konflik.

5. Pembahasan Hasil

Peran ASEAN dalam Mengatasi Konflik Bersenjata

Sejak berdiri pada 1967, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara – lebih dikenal sebagai ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) memiliki misi untuk menciptakan stabilitas dan keamanan regional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di kawasan.

Sebagai organisasi kawasan, peran utama ASEAN meliputi:

- a. Wadah Dialog: menyediakan forum bagi Thailand dan Kamboja untuk berunding dan mencari solusi damai, seperti melalui pertemuan bilateral atau forum regional.
- b. Fasilitator: memfasilitasi pertemuan dan menyediakan tempat, seperti dalam kasus terkait sengketa perbatasan.
- c. Penjaga Prinsip: mendorong penerapan prinsip inti ASEAN, termasuk non-intervensi dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, untuk menjaga stabilitas kawasan.
- d. Dukungan Hukum: memberikan dukungan, misalnya melalui pengiriman *amicus curiae* (teman pengadilan) dalam sengketa di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Kuil Preah Vihear.

Dalam merespon memanasnya hubungan bilateral Kamboja-Thailand, Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025, berinisiatif signifikan dengan menginisiasi pertemuan trilateral pada 28 Juli antara Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Perundingan ini turut dihadiri oleh Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai pengamat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan gencatan senjata tanpa syarat antara kedua pihak setelah lima hari konflik terus terjadi (Baharudin, 2025).

ASEAN-Mediasi Konflik Kamboja-Thailand

Dalam konteks konflik bersenjata Kamboja-Thailand, peran ASEAN sebagai organisasi regional kembali dipertanyakan, khususnya dalam kapasitasnya untuk merespons dan menyelesaikan konflik antarnegara anggotanya. Konflik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa Asia Tenggara belum sepenuhnya menjadi kawasan yang aman dari ancaman konflik regional sekaligus memicu ketegangan politik yang kian meningkat dan sulit diselesaikan secara damai. Keberlanjutan konflik ini menandai hubungan yang tidak harmonis Thailand – Kamboja yang tercatat menjadi anggota ASEAN. Konflik Kawasan Indochina ini sekaligus menguji pilar *political-security community* yang dicanangkan dalam ASEAN Community Vision 2045.

Dalam konflik bersenjata Kamboja-Thailand terkait Kuil Preah Vihear, peran ASEAN adalah memfasilitasi dialog damai, mendorong prinsip non-intervensi dan non-penggunaan kekerasan (*Non-Use of Force*), serta menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi. Meski efektivitasnya terbatas, namun ASEAN tetap dipandang penting dan strategis dengan perlunya mendorong revitalisasi mekanisme penyelesaian konflik regional.

Konsep ASEAN Way

Untuk mencapai hasil maksimal, ASEAN bisa menerapkan pendekatan kompromi ala ASEAN Way yang dulu pernah dilakukan dalam menengahi konflik antarnegara anggotanya. ASEAN Way adalah pendekatan khusus yang digunakan ASEAN dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan antaranggota. Hal ini didasarkan pada kepentingan bersama dalam perdamaian, keharmonisan, dan kestabilan regional, dimana negara-negara ASEAN saling berinteraksi dan memiliki norma bersama. Jika terjadi suatu konflik diantara negara-negara anggota ASEAN, maka cara yang ditempuh harus memiliki semangat ASEAN yaitu melalui pendekatan-pendekatan diplomasi yang bersifat kompromi yang dilakukan dalam suasana musyawarah mufakat. (Djafar, 2008)

Konsep musyawarah (konsultasi) dan mufakat (*consensus*) adalah istilah yang digunakan dalam diplomasi ASEAN. Pendekatan diplomasi semacam ini dinilai langkah kompromi untuk mencari titik temu dari berbagai perbedaan sudut pandang. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pola berpikir dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dengan berprinsip demi keutuhan ASEAN itu sendiri. Di sisi lain, diharapkan pola diplomasi ini mampu mengakomodasikan hubungan yang baik diantara negara-negara anggota ASEAN. Melalui pertemuan dan dialog yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai, adalah cara kompromi dilakukan untuk mencari penyelesaian suatu konflik yang terjadi.

Untuk menghindari konflik, ASEAN bergantung pada negosiasi informal dan ringan. ASEAN Way ini yakni tidak menggunakan cara memaksa dalam upaya penyelesaian konflik, adanya kekuasaan regional oleh semua Negara anggota dan penyelesaian masalah regional yang dilakukan secara regional pula, harus adanya doktrin non-inteferece oleh semua anggota dan tidak memakai campur tangan militer dan lebih mengutamakan jalan bilateral atau komunikasi dua arah. Untuk itu harus ada *strategic goals* ASEAN Way sebagai landasan.

***Strategic goals* ASEAN Way yang dimaksud mencakup:**

Tidak membiarkan perselisihan antara dua negara/ bilateral mengganggu kestabilan regional dan fungsi ASEAN itu sendiri. Tidak membiarkan isu bilateral antara ASEAN dengan negara non- ASEAN memberikan dampak negatif pada hubungan di dalam ASEAN sendiri. Sehingga untuk penyelesaian konflik Preah Vihear, ASEAN melakukan fasilitasi dan mediasi berupa pertemuan triteral antara pemimpin ASEAN dengan Thailand dan Kamboja yang digagas ASEAN berbentuk mediasi dengan memasukkan kasus Preah Vihear ke dalam agenda pertemuan-pertemuan ASEAN yang melibatkan Thailand dan Kamboja.

ASEAN perlu melakukan mediasi kembali dengan melibatkan Thailand dan Kamboja dengan memasukkan kasus Preah Vihear ke dalam sejumlah agenda pertemuan ASEAN. Untuk itu ASEAN juga menjadi mediator atau perantara Thailand dan Kamboja dengan memasukkan konflik Preah Vihear sebagai agenda bahasan. Mediator yang dimaksud bisa berupa:

a. *Joint Border Committe (JBC)*

Adalah komite yang mengatur semua permasalahan di kawasan mulai masalah ekspor-impor, lintas batas suatu negara, keamanan perbatasan hingga daerah konservasi. Mediasi ini digelar di Istana Bogor, Indonesia pada Februari 2011 (Nur, 2011).

b. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN

Upaya awal ASEAN untuk menyelesaikan konflik Kuil Preah Vihear yang mencermati bahwa sengketa wilayah yang awalnya melibatkan dua negara kini berubah menjadi konflik bersenjata dan penting untuk dibawa ke dalam salah satu agenda Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN). Hal ini pernah diadakan pada Mei 2011 yang dilaksanakan di Jakarta.

c. *ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM)* dan *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* Merupakan pertemuan Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN yang biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun. ADMM ini menjadi bagian dalam pembentukan *ASEAN Political Security Community (APSC)*. Keberadaan ADMM lebih mengarah kepada mekanisme konsultasi dan kerja sama yang bertujuan untuk mengeratkan kepercayaan antar sesama negara anggota dan kepercayaan diri sehingga meningkatkan sifat terbuka dan transparansi antar anggota.

d. *Shuttle Diplomacy ASEAN*

Pada tahun 2011, ASEAN pernah menerapkan *shuttle diplomacy*. Dalam *shuttle diplomacy*, pihak ketiga atau perantara yang terlibat merupakan pihak yang dipercaya dan bersifat netral atau tidak memihak kubu manapun. Dalam hal ini, pihak ketiga itu adalah ASEAN yang diwakili oleh Indonesia.

6. Kesimpulan

Ada sejumlah kesimpulan yang bisa penulis berikan:

- a. Setiap negara memperjuangkan keamanan dan kepentingan nasional masing-masing. Jadi, kalau ada negara lain yang mengusik wilayahnya, maka negara tersebut berhak untuk membela sekaligus melindungi wilayah kedaulatannya. Konflik ini bukan hanya bangunan, tetapi juga tentang sejarah, identitas, dan kebanggaan nasional, yang diperumit oleh interpretasi peta yang berbeda dan keputusan hukum internasional yang tidak sepenuhnya diterima oleh kedua belah pihak, menyebabkan perselisihan perbatasan yang berlarut-larut.
- b. Ada sejumlah faktor penyebab akar konflik, salah satunya adalah sengketa perbatasan. Dalam kasus Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand yang awalnya hanya sengketa wilayah dimana sejak 1962 dimana Thailand dan Kamboja sama-sama mengajukan perihal hak kepemilikan wilayah kepada Mahkamah Internasional. Tetapi, Mahkamah Internasional memutuskan bahwasanya Preah Vihear menjadi hak milik Kamboja. Namun sengketa ini

meluas dengan melibatkan operasional militer kedua negara karena tahun 2008 Kamboja mengajukan proposal agar Kuil Preah Vihear dimasukkan salah satu warisan UNESCO, dan diterima.

- c. Ketika timbul sengketa dan meluas dengan melibatkan kekerasan senjata, tentunya untuk meredakannya membutuhkan pihak lain. Dalam hal ini, peran ASEAN sebagai *peacemaker* untuk menyelesaikan konflik Preah Vihear yaitu dengan memfasilitasi pertemuan trilateral antara pemimpin ASEAN, Thailand dan Kamboja dan memediasi kasus ini dengan memasukkan kasus Preah Vihear ke dalam agenda pertemuan ASEAN. Dalam hal ini memang kasus Kuil Preah Vihear mengundang keterlibatan pemerintah AS, Tiongkok dan ASEAN. Khusus ASEAN, karena konflik yang terjadi antara kedua negara ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN itu sendiri. Untuk itu, maka ASEAN secara proaktif harus turut andil dalam penyelesaian konflik ini dengan prinsip-prinsip Non-Intervensi dan menawarkan sejumlah Solusi. Penulis mencermati, untuk meredakan konflik, ASEAN perlu menerapkan kembali ASEAN Way, mengadakan *Joint Border Committee* (JBC), Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan juga *ASEAN Defence Minister Meeting* serta bisa menerapkan Kembali strategi Shuttle Diplomacy ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. (2025, June 19). *Pemerintah Thailand dalam krisis di tengah dampak dari bocornya percakapan telepon PM*. <https://www.aljazeera.com/news/2025/6/19/thai-government-in-crisis-amid-fallout-from-pms-leaked-phone-call>
- Al Jazeera. (2025, July 26). *Warga Kamboja mengungsi dari perbatasan dengan Thailand saat bentrokan berlanjut untuk hari ketiga*. <https://www.aljazeera.com/news/2025/7/26/cambodians-flee-border-with-thailand-as-clashes-continue-for-third-day>
- Al Jazeera. (2025, July 29). *Thailand menuduh Kamboja melanggar gencatan senjata tetapi gencatan senjata masih berlaku*. <https://www.aljazeera.com/news/2025/7/29/thai-army-accuses-cambodia-of-ceasefire-violations>
- AP News. (2025, July 27). *Thailand dan Kamboja sepakat untuk pembicaraan gencatan senjata setelah Trump turun tangan, tetapi bentrokan perbatasan tetap berlanjut*. <https://apnews.com/article/thailand-cambodia-armed-clash-border-ceasefire-ae1ca49539793aeaf0ce71d4d1cf42a0>
- Astarini, D. R. S., & Rofii, M. S. (2021). Siber intelijen untuk keamanan nasional. *Jurnal Renaissance*, 6(1), 703. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i1.143>
- Baharudin, H. (2025, January 12). *Truce between Cambodia and Thailand secured under ASEAN chair Malaysia, but can it hold?* The Straits Times.

<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/truce-between-cambodia-and-thailand-secured-under-asean-chair-malaysia-but-can-it-hold>

- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan nasional dalam hubungan internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109–115. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>
- CNN. (2011, February 8). *Sekutu AS dan Mitra Strategis China Saling Balas Tembakan di Asia Tenggara: Bentrokan Perbatasan Kamboja-Thailand Meningkatkan Kekhawatiran Akan Kembalinya Ketidakstabilan Regional*. <https://theasialive.com/u-s-ally-and-chinas-strategic-partner-exchange-fire-in-southeast-asia-cambodia-thailand-border-skirmish-raises-fears-of-renewed-regional-instability/2025/06/02/>
- Djafar, Z. (2008). *Indonesia, ASEAN, dan dinamika Asia Timur*. PT Dunia Pustaka Jaya.
- FP News Desk. (2025). *Thailand menuduh Kamboja melanggar gencatan senjata karena 'lebih dari 250' drone melintasi perbatasan*. <https://www.firstpost.com/world/thailand-accuses-cambodia-of-ceasefire-breach-as-more-than-250-drones-cross-border-13963775.html>
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Liliweri. (2017). *Komunikasi antar personal*. Penerbit Kencana.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Thailand. (1979). *Civil Defence Act, B.E. 2522*. Government Gazette, 96(41).
- The Asia Live. (2025, June 2). *Thailand dan Kamboja saling tembak dan tuding terkait kuil kuno*. <http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/02/06/cambodia.thailand.violence/>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.